

**PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH
DESA PETAI BARU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2018**

Oleh: Deni Prasetyo

Email : denipepsi155@gmail.com

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Suatu Negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Bukan hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan. pembangunan pedesaan adalah suatu perbaikan yang terjadi secara menyeluruh terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Seperti halnya Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pembangunan ekonomi masyarakat desa di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pembangunan ekonomi masyarakat desa di Desa Petai Baru dalam hal menjalankan Pembangunan ekonomi masyarakat di Desa.

Pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Petai Baru masih jauh tertinggal di banding desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi. Perencanaan Pembangunan ekonomi masyarakat yang dibuat oleh Aparatur Pemerintahan Desa belum bisa menjawab aspirasi masyarakat serta tidak bersinergi dengan Visi Misi Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru.

Konsep teori yang peneliti gunakan adalah Teori Pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian penulis adalah Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru belum berjalan baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Minimnya koordinasi antara pemerintah Desa dan masyarakat, dan masih kurang maksimal kinerja KUD juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya ekonomi masyarakat di Desa Petai Baru.

Kata Kunci: Penguatan lembaga ekonomi, Pengalokasian sumber daya manusia, Penguatan teknologi

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹ pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretaris Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh staf sekretariat berdasarkan pasal 26 ayat 2, kewenangan Kepala Desa dalam perekonomian masyarakat adalah membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa² Bab I Ayat 9, menjelaskan pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Bab III Pasal 5 sampai Pasal 14 membahas tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang dijelaskan pada Bab V Pasal 14 menjelaskan Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) meliputi kegiatan yaitu, meningkatkan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi, penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha milik Desa dan revitalisasi modal sosial kawasan perdesaan, infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan, penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber pemasukan ekonomi serta pemasaran, dan penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan.

Desa Petai Baru berdiri sejak tanggal 27 Januari 1993 atas program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Desa Petai Baru termasuk ke dalam kategori Desa Swadaya, pada tahap pertama terdiri dari 200 KK kemudian disusul transmigran tahap kedua pada tanggal 30 Januari 1995 yang terdiri dari 121 KK. Dengan demikian, ketika itu Desa Petai Baru terdiri dari 321 KK yang kemudian dibagi menjadi 2 wilayah dusun, yaitu Dusun Sukajadi dan Dusun Maduraja dengan 5 RW dan 15 RT.³

Potensi ekonomi yang ada di Desa Petai Baru meliputi bidang pertanian dengan berbagai jenis tanaman yaitu

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014*

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

³ Dokumen Profil Desa Petai Baru. Hlm 5.

jagung, palawija, karet, dan kelapa sawit. Untuk bidang peternakan ada beberapa jenis binatang ternak yang ditenakkan yaitu kambing, sapi, ayam, itik, dan burung.

Program Koperasi Unit Desa (KUD)⁴ merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau kerja sama untuk melakukan usaha yang sangat jelas berbeda dengan jenis usaha yang lain yang biasanya berorientasi kepada modal dan keuntungan yang bakal diterima. Koperasi lebih mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perekonomian bagi kesejahteraan para anggotanya. Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Program yang ada di KUD Sawit Jaya antara lain yaitu, perkreditan atau simpan pinjam, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengelolaan hasil pertanian, dan perdagangan.

Salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Namun BUMDes tidak hanya berfungsi menjadi lembaga komersil yang

membuka ruang lebih luas kepada masyarakat Desa untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga menyumbang penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan dan perkembangan ekonomi Desa dapat dilihat dari jumlah perkapita setiap tahunnya di Desa Petai Baru dan di Kecamatan Singingi pada tahun 2018. Data tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1 Data Pendapatan Perkapita desa-desa di Kecamatan Singingi Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah
1	Air emas	Rp 1.500.000
2	Kebun Lado	Rp 1.400.000
3	Logas	Rp 1.700.000
4	Logas Hilir	Rp 1.600.000
5	Muara Lembu	Rp 1.650.000
6	Pangkalan Indarung	Rp 1.350.000
7	Pasir Emas	Rp 1.400.000
8	Petai Baru	Rp 1.350.000
9	Pulau Padang	Rp 1.450.000
10	Sumber Datar	Rp 1.400.000
11	Sungai Bawang	Rp 1.400.000
12	Sungai Kuning	Rp 1.400.000
13	Sungai Keranji	Rp 1.350.000
14	Sungai Sirih	Rp 1.550.000

Sumber: data buku induk profil Kecamatan Singingi

Data daftar rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Desa Petai Baru tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Data Rata-Rata Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa Petai Baru Tahun 2014-2018

No	TAHUN	JUMLAH
1	2014	Rp 1.300.000
2	2015	Rp 1.300.000
3	2016	Rp 1.300.000
4	2017	Rp 1.350.000
5	2018	Rp 1.350.000

Sumber : Kantor Desa Petai Baru

⁴ Muhammad, Buchari Sibuea, 2011, *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani*, Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian Vol.8 No.1

Namun pada kenyataannya dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Desa masih sering dijumpai berbagai masalah. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasanya pendapatan perkapita di Desa Petai Baru tidak mengalami pendapatan yang signifikan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu :

1. Minimnya koordinasi antara pemerintah Desa dan masyarakat serta pihak terkait terhadap perbaikan infrastruktur jalan menuju perkebunan, sehingga pengemudi sawit tidak bisa bekerja secara maksimal. Di dalam RPJMDes telah dijelaskan bahwasannya jalan menuju kebun memang belum ada pembetonan jalan, sehingga ini membuat para supir armada pengangkut sawit tidak dapat bekerja maksimal apalagi ketika hari hujan, mereka tidak bisa mengangkut sawit dari kebun.
2. Masih kurang maksimal kinerja KUD terhadap program simpan pinjam dan program lainnya, dana yang dipinjam ke masyarakat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga aliran dana menjadi terhambat. program simpan pinjam mengalami kemacetan, dikarenakan masyarakat Desa yang selalu telat membayarkan uang, sehingga dana simpan pinjam tidak berputar dan macet.
3. Kurangnya intensitas pemerintah Desa mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk masyarakat Desa, sehingga SDM tidak mengalami peningkatan. karena dengan adanya keterampilan, masyarakat Desa yang khususnya tidak terlibat dalam kepengurusan sawit bisa menjadi kreatif, sehingga nantinya diharapkan perekonomian masyarakat menjadi naik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru?
2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat oleh Pemerintah Desa Petai Baru.

Kerangka Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke

kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumber daya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
 - a) peningkatan akses bantuan modal usaha;
 - b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan
 - c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembahasan

1.1 Penguatan Lembaga Ekonomi

Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah adalah strategi penguatan lembaga ekonomi desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Pembangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh KUD dan pemerintah desa melalui dana APBDesa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa Petai Baru. Salah satu prioritas yang diharapkan masyarakat adalah pelatihan keterampilan masyarakat untuk menunjang perekonomian, karena mayoritas masyarakat desa adalah berkebun, maka masyarakat mengharapkan adanya pelatihan atau penyuluhan tentang perkebunan.

Pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat di desa Petai Baru tahun 2018 belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat masalah khususnya pada anggaran dan partisipasi dari KUD Sawit Jaya yang rendah, ketidak sinkronan yang terjadi menimbulkan masalah dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat di Desa Petai Baru.

Selanjutnya dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat di desa Petai Baru belum berjalan secara optimal. Pemerintah Desa Petai Baru terus melakukan upaya agar pembangunan

⁵ Sumodiningrat dalam Mardi.2002.*Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.jakarta. Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat:Bappenas

ekonomi masyarakat yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu pemerintah Desa juga mengharapkan hubungan yang baik dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Petai Baru untuk pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat yang telah direncanakan bersama ini. masalah anggaran yang dibutuhkan pemerintah Desa dan KUD akan ada jalan keluar sehingga dapat membantu Pemerintahan Desa dalam mencari anggaran untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Petai Baru.

Selain itu, fenomena menunjukkan bahwa pemerintahan desa diperlukan sama seperti pemerintahan daerah, yang dimana artinya desa dikembalikan secara sentralistik oleh pemerintahan pusat. Dimana kondisi seperti itu menguat satu prinsip bahwa desa sebagai subsistem pemerintahan nasional. Untuk itu desa harus di kontrol secara baik.

1.2 Pengalokasian Sumber Daya

Kelemahan mendasar terkait modal usaha menyebabkan ketergantungan petani kepada para tengkulak disebabkan oleh keadaan ekonomi para petani tersebut, mereka sering kekurangan modal dalam melakukan usahanya, untuk mengatasi keadaan tersebut, mereka meminjam uang kepada para tengkulak dengan menjual hasil pertaniannya, akibatnya para tengkulak yang sekaligus berfungsi sebagai pelepas uang itu, dapat mempermainkan harga barang-barang pertanian sesuai dengan kehendak mereka. Inilah yang mendorong masyarakat untuk mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah penyalur kredit di masyarakat pedesaan Desa Petai Baru.

Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan perekonomian rakyat. Melalui simpan pinjam atau utang-piutang untuk usaha pertanian, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bisa mengambil manfaat dan digunakan dengan baik serta dapat mengembangkan usaha

yang dilakukan. Pinjaman biasanya diberikan oleh koperasi kepada petani sebagai fasilitas talangan pada saat petani mengalami kemerosotan dalam panennya. Sebagai pinjaman kepada petani, dimana koperasi menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan petani dimana dalam pengembalian dilakukan secara cicilan melalui hasil panen tiap masa tanamnya dalam setahun.

Pemerintah mengharapkan agar pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Maka dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan di bidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan.

Semua usaha yang dilakukan dalam proses pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

1.3 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada 5 poin Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di bidang Pertanian yaitu:⁶

1. Tingkat partisipasi petani untuk menjadi anggota KUD, sangat berhubungan dengan pengetahuan, kemauan dan kesempatan petani untuk menjadi anggota KUD. Dari segi pengetahuan, petani tidak terlalu banyak mengetahui fungsi koperasi unit desa untuk pengembangan usahatani. Petani tidak banyak mendapatkan sosialisasi akan pentingnya KUD dalam melayani kebutuhan sarana produksi, permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Petani hanya menerima informasi dalam bentuk program usaha pertanian yang mempunyai jangka waktu pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan kemauan mereka. Sikap petani ini diakibatkan oleh manajemen KUD yang tidak berpihak pada petani, terutama petani kecil yang hanya mempunyai lahan untuk kegiatan produksi pertanian skala rumah tangga (subsisten).
2. Kesiapan infrastruktur pedesaan sangat menentukan lancarnya implementasi program KUD ke tingkat petani. Seperti: sarana transportasi, sarana komunikasi (media cetak dan elektronik), dan sistem jaringan komputerisasi, masih terbatas di pedesaan, sehingga menyebabkan pelayanan KUD kepada nasabah (petani) masih terbatas.
3. Peran lembaga penyuluhan pertanian dalam memberikan edukasi kepada petani berdasarkan permasalahan yang mereka hadapi masih belum menyentuh sendi-sendi kehidupan petani. Penyuluhan pertanian masih terpolo pada manajemen topdown, sehingga petani selalu saja tergantung pada program pemerintah yang sering tidak sejalan dengan harapan petani. Lembaga Penyuluhan pertanian melalui sistem pendidikan non formal yang berbasis pada pendidikan orang dewasa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani dalam melaksanakan usahatani melalui sistem agribisnis dengan mengembangkan proses adopsi dan difusi teknologi pertanian yang sesuai dengan sumberdaya lokal di tingkat petani, sehingga dapat menunjang kemauan, pengetahuan dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam program KUD.
4. Potensi sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Pengelolaan KUD perlu diarahkan pada potensi sumberdaya lokal dan sistem usahatani yang ada di tingkat petani. Pola manajemen KUD ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian KUD terhadap kebutuhan petani dan tidak mengandalkan pola manajemen keuntungan yang tidak sesuai dengan kondisi petani. Pada dimensi ini alangkah baiknya potensi SDM yang mengelola KUD perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan potensi desa, dan pemahaman terhadap perilaku sosial ekonomi petani di pedesaan.

⁶ Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm:32.

5. Eksistensi hasil produk pertanian dan kemitraan. Eksistensi pengelolaan hasil produk pertanian dan kemitraan sangat penting dalam menunjang keberlanjutan penyelenggaraan KUD. Fungsi KUD secara implikasinya dapat membantu petani dalam memasarkan hasil produksi pertanian, untuk itu eksistensi dari hasil produksi pertanian tersebut setiap saat dapat terpenuhi sebagai modal KUD dalam merencanakan program pemasaran hasil pertanian secara kontinyu yang dapat menjamin berbagai pelaku usaha pertanian dalam menerima hasil produksi pertanian di pedesaan secara berkelanjutan.

Adanya 5 eksistensi hasil produksi pertanian ini Dengan demikian pola kemitraan yang di bangun melalui KUD adalah hubungan kemitraan dengan pengusaha pertanian yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan petani, yang akhirnya berdampak pada pemenuhan ekonomi petani.

1.4 Penguasaan Teknologi

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, teknologi dikembangkan untuk membuat hidup lebih baik, efisien, dan mudah. Tak bisa dihindari, manusia selalu hidup bersama teknologi.

Begitu juga di Desa Petai Baru. Teknologi juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan KUD untuk memberikan kemudahan dalam berkerja dan melaksanakan aktifitas seperti dalam bidang administrasi yang sudah berbasis online dan menggunakan komputer, tentu nya ini menjadi poin yang bagus untuk desa. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian besar masyarakat yang tidak paham akan teknologi, inilah yang harus dilaksanakan pemerintah desa Petai Baru yaitu memberikan pemberdayaan untuk

meng edukasi masyarakat agar melek akan teknologi.

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Petai Baru

2.1 Kurangnya kesadaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya akan berpengaruh juga terhadap berhasil tidaknya suatu pemberdayaan, karena jika masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Kesadaran dalam upaya mengelola KUD juga sangat dibutuhkan karena jika KUD tidak dikelola dengan baik maka susah untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan dapat digunakan untuk wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Petai Baru masih jauh tertinggal di banding desa-desa yang ada di kecamatan singingi. Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat yang dibuat oleh aparaturn pemerintahan desa belum bisa menjawab aspirasi masyarakat. Dalam hal membantu pembangunan ekonomi masyarakat di desa Petai Baru ini kecamatan perlu mendukung pemerintahan desa dan KUD Sawit Jaya yang ada di desa Petai Baru.

2.2 Anggaran

Anggaran juga termasuk salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pemberdayaan pembangunan ekonomi, dimana anggaran merupakan salah satu yang sangat penting didalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat, dan juga menjadi tolak ukur

kesuksesan sebuah program ataupun kebijakan pemerintah yang terkhususnya didalam membutuhkan anggaran demi mensukseskan program pelaksanaan tersebut. Untuk tetap terjaganya faktor anggaran didalam suatu program pembangunan ekonomi masyarakat, maka seluruh pihak-pihak yang terkait didalam penyusunan anggaran harus dapat bekerja dengan baik.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Selain itu, partisipasi masyarakat selalu ditekankan, hal ini untuk menyadarkan masyarakat agar mereka saling memiliki program-program pembangunan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan. Sehingga hasil pembangunan ekonomi masyarakatnya yang tercapai tidak bermanfaat dimasa sekarang saja, tapi juga dimasa yang akan datang. Namun yang terjadi di Desa Petai Baru ini mulai kurang menanamkan jiwa berpartisipasi didalam pembangunan ekonomi masyarakat, Masyarakat belum merasakan dampak pembangunan ekonomi masyarakat yang telah terjadi. Karna itulah faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Maka penyebabnya Masyarakat desa tidak acuh terhadap pembangun mereka lebih mengutamakan untuk mencari kelangsungan hidup mereka dengan berkebun dan bertani karna langsung berdampak kepada ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Pemberdayaan pembangunan ekonomi pedesaan Desa Petai Baru diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan mendasar, yaitu terbatasnya prasarana dan sarana dasar, informasi peluang usaha/pasar, serta pengetahuan, keterampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat di pedesaan, Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan di

perdesaan dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana dasar pedesaan, Belum mantapnya KUD serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan yang telah menjadi urusan atau kewenangannya.

Penjabaran diatas dipengaruhi juga oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ketersediaan anggaran dan kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat.

Saran

Pemerintah desa dan pemerintah daerah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah pemberdayaan perekonomian di Desa Petai Baru, dan pemerintah desa maupun KUD harus mampu meningkatkan kualitas kerja agar pemberdayaan perekonomian masyarakat berjalan dengan sebaik baiknya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Mardi. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi* jakarta. Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat. Bappenas
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Jurnal :

- Muhammad, Buchari Sibuea, 2011, *Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani*, Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian Vol.8 No.1

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor
23 Tahun 2014 tentang daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Kabupaten
Kuantan Singingi.